



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **EVALUASI PENGELOLAAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Indah Pratama Sari**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email : indahpratamasari99@gmail.com

### ***Abstrak***

*Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Singingi, Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi, Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi. Teknik penentuan informan digunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana informan yang digunakan adalah Camat Singingi, Sekretaris Camat Singingi dan Lurah. untuk sampel masyarakat penarikan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 44 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut, dan kualitatif melalui wawancara kemudian Reduksi data, penyajian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata total 84 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi dan wawancara penulis dengan informan dilapangan yang menunjukkan memang kurang baiknya Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi ini.*

**Keywords: Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### ***Abstract***

*This research was conducted in Singingi District, to find out how to manage waste/cleaning services in Singingi district. The problem formulation in this research is how to manage waste/cleaning services in Singingi district. The technique of determining the informants used purposive sampling. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations, in which the informants used are Singingi Camat, Singingi Camat Secretary and Lurah. for the sample of the community, the sample was drawn using the Simple Random Sampling technique, namely the sampling of members of the population was carried out randomly without regard to the strata in the population, in which the number of samples for this study amounted to 44 people. The data analysis used is descriptive quantitative and qualitative, quantitative, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing, and then the author draws conclusions from the results of processing the data, and qualitatively through interviews then data reduction, data presentation and then the author draw conclusions. The results of the distribution of the questionnaire show that the Management of Waste/Cleaning Services in Singingi District which produces a total average value of 84 means that it is in the Poor interval. As well as the author's observations and interviews with informants in the field which show that the Management of Waste/Cleaning Services in Singingi District is indeed not good.*

**Keywords : Waste/Cleaning Service Management**



## **1. PENDAHULUAN**

Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 menjelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga, Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau lainnya.

Meningkatnya jumlah penduduk serta adanya perubahan pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah volume, jenis, dan karakteristik sampah, bahkan semakin beragam, dalam hal ini tentu mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang harus ditangani di Kabupaten Kuantan Singingi. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah, karena masyarakat merupakan penghasil utama sampah. Begitupun di Kabupaten Kuantan Singingi.

Meningkatnya volume sampah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi tentu akan berdampak pada Tempat Pembuangan Semetara (TPS) di Kuantan Singingi. Keadaan TPS di Kuantan Singingi kini begitu memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan pemrosesan akhir sampah di TPS di Daerah Kuantan Singingi tidak berwawasan lingkungan (*enviromental friendly*), yaitu masih menggunakan sistem open dumping. Sampah di TPS sudah menggunung. Hal tersebut jelas membuat warga sekitar TPS menjadi resah dengan keadaan TPS yang semakin memburuk. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa, Pemerintahan Kabupaten dan Kota berhak membuat peraturan daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan daerahnya tersebut. Di Kuantan Singingi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2011 tentang Sistem open dumping adalah pembuangan sampah di TPS dengan terbuka tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Menggunakan sistem open dumping dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, udara, dan air. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi, dikeluarkannya Perda tersebut sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang nantinya juga meningkatkan volume sampah. Perda No. 15 Tahun 2011 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Kebijakan tentang pengelolaan sampah tersebut memiliki asas dan tujuan yang tersurat secara jelas. Asas yang termuat dalam kebijakan tersebut adalah; asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuannya yaitu; pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, meningkatkan efisiensi penggunaan baku, serta merubah perilaku setiap orang. Dengan diterbitkannya Perda No. 15 Tahun 2011 bertujuan dapat meminimalisir permasalahan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi, namun realitanya, dengan adanya Perda tersebut belum mampu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan



dan penanganan sampah. Penanganan masalah sampah dan segala macam dampaknya bagi masyarakat harus dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis dengan pengelolaan yang baik agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan usaha pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan serta meningkatkan peran masyarakatnya. Permasalahan yang terjadi di TPS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Pemrosesan akhir dengan sistem open dumping, Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara terpadu berintegrasi dan bekesinambungan untuk terwujudnya lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih dari sampah dalam bentuk pengurangan dan penanganan sampah.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk terwujudnya lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih dari sampah dalam bentuk pengurangan dan penanganan sampah, namun kenyataannya masih banyak sampah yang berserakan. Di Kuantan Singingi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2011 tentang Sistem open dumping adalah pembuangan sampah di TPS dengan terbuka tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Menggunakan sistem open dumping dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, udara, dan air. Permasalahan yang terjadi di TPS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Pemrosesan akhir dengan sistem open dumping. Sistem open dumping merupakan salah satu pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan, karena sampah hanya ditumpuk di zona pembuangan tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Penumpukan yang terjadi di semua TPS Kabupaten Kuantan Singingi jelas akan menimbulkan berbagai dampak bagi penduduk, khususnya bagi warga yang bertempat tinggal di sekitaran TPS. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat yang tinggal di sekitaran TPS yaitu, timbulnya penyakit kulit hingga gangguan pernafasan. Namun selain menyebabkan penyakit, sampah merupakan sesuatu yang dapat mengganggu pemandangan serta menimbulkan bau tidak sedap. Maka dari itu untuk mencegah permasalahan tersebut diperlukannya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya agar dapat meminimalisir permasalahan menumpuknya sampah yang terjadi di TPS Singingi. Tumpukan sampah yang berada di TPS Singingi ini semakin memprihatinkan. Memang memerlukan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah.

Kecamatan singingi adalah salah satu kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Kuantan Singingi, Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikecamatan singingi belum lah baik, dimana dikecamatan singingi belum terdapat tempat pembuangan akhir, hanya terdapat tempat pembuangan sementara. banyak sampah berserakan, timbunan sampah pada tempat pembuangan sementara yang sudah menggunung yang mengganggu masyarakat karena sampah menimbulkan bau serta sarang penyakit. berdasarkan observas penulis dilapangan menemukan menemukan beberapa fenomena yaitu:

1. Kecamatan Singingi masih belum memiliki tempat pembuangan akhir dari sampah-sampah, sehingga banyak sampah menumpuk ditempat pembuangan sampah sementara.
2. Kurangnya tong sampah untuk menampung sampah masyarakat, sehingga sampah-sampah menumpuk dan berserakan disekitaran tong sampah tersebut.
3. Kurangnya tong sampah juga mengakibatkan masyarakat membuang sampah di beberapa tempat yang bukan seharusnya tempat membuang sampah, bahkan membuang sampah ke sungai.
4. Kurangnya pengelolaan sampah, dimana waktu pengangkutan sampah dari tempat



pembuangan sementara cukup lama, sehingga sampah di tempat-tempat pembuangan sementara sudah sangat menumpuk ya sangat mengganggu masyarakat setempat.

Berdasarkan penomena diatas terdapat beberapa permasalahan mengenai pengeolaan sampah, diamana permasalahan tersebut tidak hanya oleh kinerja dinas terkait melainkan juga oleh kesadaran masyarakat, dimana Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah harus didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi mengingat perilaku masyarakat merupakan suatu hal yang begitu penting untuk meminimalisir permasalahan sampah yang terjadi di TPS di Kecamatan Singingi khususnya. Penanganan sampah di TPS Kuantan Singingi hanya bertumpu pada penimbunan sampah tanpa adanya pengolahan sampah, misalnya seperti pemilahan sampah sebelum dibuang ke lahan pembuangan, serta tidak adanya pengolahan sampah untuk mereduksi timbunan sampah. Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengambil judul penelitian yaitu : “Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara**

Secara terminology menurut Ali (2015 : 23) apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah tercciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafii, 2010 : 3) ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut soejono soekanto (dalam Syafii, 2010 : 3) secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara. (Kumortono, 2005 : 82).

Menurut The Liang Gie (dalam Syafii, 2010 : 14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. (Silalahi, 2009 : 21)

Dalam kegiatannya Henry Fayol (dalam Anggara, 2012 : 144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin



- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

- 2. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
- 3. Adanya kerjasama.
- 4. Adanya proses usaha.
- 5. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
- 6. Adanya tujuan. (Siagian 2001 : 2)

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

- 1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
- 2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).



3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

### **2.1.2 Teori/Konsep Organisasi**

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. (The Liang Gie, 1979 : 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (*the form of every human association for the attainment of a common purpose*).

Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasi (*organizing*) ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan-hubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadikesatuan yang selaras. Termasuk pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Penelaahan terhadap struktur di mana administrasi itu berlangsung menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut berikut.

- a. Teori organisasi (*theory of organization*).
- b. Analisis organisasi dan metode (*O & M analysis*).
- c. Perilaku administratif (*administrative behavior*).
- d. Hubungan manusia (*human relation*)

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Silalahi (2011 : 124) menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. Menurut nya Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Robbins (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

- 1 Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2 Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.



- 3 Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

### **2.1.3 Teori/Konsep Teori Manajemen**

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para organisasi serta penggunaan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Tohardi, 2002 : 10)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2010 : 16).

Manajemen (*management*) adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. (Simamora, 1999 : 3)

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2007 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen dikembangkan. Menurut schermerhorn (dalam Edison,dkk 2017 : 6) terdapat 4 fungsi manajemen yaitu :

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.



4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

#### **2.1.4 Teori Evaluasi**

Menurut istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. (Thoha, 2003:1)

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya (Hakam, 2016 : 2)

Evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Stutflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. (Arikunto,dkk 2010 : 56)

Secara umum evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai. definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.(Sukardi, 2005:1)

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45)

Tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah (Crawford, 2000 : 30) :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang.

Evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan. (Umar, 2005 : 78) :

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam dunia bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, mengacu pada program kerja perusahaan. Dalam program kerja perusahaan banyak terdapat aspek-aspek yang dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi biasanya yang di prioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-succes* factor –nya.
2. Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan,



tahapan-tahapan kerja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.

3. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
4. Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan sesuai dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
5. Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
6. Tindak lanjut evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), yaitu;

- a. *Utility* (manfaat) Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
- b. *Accuracy* (akurat) Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
- c. *Feasibility*(layak) Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2002 : 41-42), yaitu :

- a. Sistem assessment  
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.
- b. Program planning  
Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.
- c. Program implementation  
Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.
- d. Program Improvement  
Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.
- e. Program Certification  
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan



Menurut Dunn (dalam Nugroho 2017: 289) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama

### **2.1.5 Teori Persampahan**

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. (Subekti, 2011: 1)

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. (Alex, 2012 : 4)

### **2.1.6 Teori Kebijakan**



Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2006 : 6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan

Adapun dari Carl Friedrich (dalam Agustino, 2006 : 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamaksud.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto, 2007 : 3-4) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis (dalam Edi Suharto, 2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsiasumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak



melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017 : 8)

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner yaitu

#### **1. Indikator Efektifitas Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

- Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 75 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Kurang Baik, hal ini terlihat dari masih banyak sampah yang berserakan dipinggir jalan dikarenakan kurangnya tong sampah dan belum adanya TPA, hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan menunjukkan Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi, serta dibuktikan dengan hasil



wawancara bersama informan yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi Belum Maksimal.

- Pencapaian tujuan dari Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 81 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pencapaian tujuan dari Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pencapaian tujuan dari Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih belum maksimal, hal ini terlihat dari masih banyak sampah yang berserahkan masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Pencapaian tujuan dari Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih belum maksimal, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan bahwa Pencapaian tujuan dari Pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi Belum Maksimal.

## 2. Indikator Efisiensi Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

- Efisiensi Usaha oleh pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 84 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Usaha oleh pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Usaha oleh pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih belum maksimal, hal ini terlihat dari masih banyak sampah yang berserahkan, masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, karena tong sampah kurang, serta lamanya pengambilan sampah. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Usaha oleh pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih belum maksimal, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan bahwa Usaha oleh pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi belum maksimal.

- Tingkat efisiensi penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 88 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Tingkat efisiensi penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Tingkat efisiensi Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih belum maksimal,



hal ini terlihat dari masih banyak sampah yang berserahkan, serta Karena terkendala oleh beberapa faktor yaitu Kurangnya pengawasan dari tingkat kabupaten kepada kecamatan dan Kurangnya sosialisasi terhadap Perda tersebut. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Tingkat efisiensi Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih belum maksimal, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan bahwa Tingkat efisiensi penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi belum maksimal.

3. Indikator Kecukupan Sumber daya dalam menyelenggarakan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.
  - Kecukupan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 80 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kecukupan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa masih kurangnya Kecukupan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi, karena kurangnya petugas serta kurangnya tempat pembuangan sampah menakitatkan banyak sampah yang berserahkan, masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, karena tong sampah kurang, serta lamanya pengambilan sampah oleh petugas. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan kurangnya Kecukupan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan bahwa kurangnya Kecukupan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.
  - Kecukupan peralatan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 84 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kecukupan peralatan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa masih kurangnya peralatan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi, masih kurangnya tong sampah hingga membuat berserakan disekitaran karena tong sampah sudah penuh, belum adanya alat pengangkut sampah dan operasional mobilisasi persampahan, Belum adanya TPA. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan kurangnya peralatan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan bahwa kurangnya peralatan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.
4. Indikator Kesamaan proses pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.



- Kesamaan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi dengan kecamatan lainnya.  
Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 87 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan kesamaan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi dengan kecamatan lainnya pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.  
Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa kesamaan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi dengan kecamatan lainnya masih kurang, terlihat di sini Belum adanya TPA dan kurangnya tenaga kebersihan, misalnya sampah selesai hari pasar dan dikumpulkan lalu dijemput oleh mobil sampah dari kabupaten, karena kurangnya tenaga kebersihan masyarakat Mengadakan gotong royong bersama di kecamatan, Belum ada mobil pengangkut sampah sehingga menunggu mobil pengangkut sampah dari kabupaten. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan kesamaan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi dengan kecamatan lainnya masih kurang, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan mengenai kesamaan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi dengan kecamatan lainnya.
  - Pemberlakuan kesamaan proses penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini di kecamatan singingi.  
Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 77 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan kesamaan proses penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini di kecamatan singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.  
Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa kesamaan proses penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini di kecamatan singingi Belum maksimal, terlihat di sini Belum adanya TPA, sehingga menunggu mobil pengangkut sampah dari kabupaten untuk mengangkut sampah dan juga kurangnya tenaga kebersihan, Belum ada mobil pengangkut sampah, Kurang peralatan pembersihan sampah dan pemungutan sampah, Kurangnya tenaga kebersihan, agar terwujudnya lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih maka harus dilengkapi. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan kesamaan proses penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini di kecamatan singingi masih kurang, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan mengenai kesamaan proses penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
5. Indikator Ketanggaan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.
- Ketanggaan dari pihak pelaksana dalam Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi.  
Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 88 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Ketanggaan dari pihak pelaksana dalam Pengelolaan Pelayanan



Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi pada Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Ketanggapan dari pihak pelaksana dalam Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi Belum maksimal, terlihat dengan terkadang terlambatnya penjemputan sampah, sampah sudah menumpuk namun belum dilakukan penjemputan sampah, karena di sini Belum adanya TPA, sehingga menunggu mobil pengangkut sampah dari kabupaten untuk mengangkut sampah. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Ketanggapan dari pihak pelaksana dalam Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi masih kurang, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan mengenai Ketanggapan dari pihak pelaksana dalam Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- Kinerja dari pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 84 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja dari pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada Kurang Baik.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Kinerja dari pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum maksimal, terlihat dengan terkadang terlambatnya penjemputan sampah, sampah sudah menumpuk namun belum dilakukan penjemputan sampah, karena di sini Belum adanya TPA, sehingga harus menunggu mobil pengangkut sampah dari kabupaten untuk mengangkut sampah. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Kinerja dari pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih kurang, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan mengenai Kinerja dari pihak pelaksana dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

6. Indikator Ketepatan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

- Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tepat dengan yang seharusnya.

Dari hasil sebaran kuesioner jumlah total = 88 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi sudah tepat dengan yang seharusnya pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan memang Penyelenggaraan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 sudah tepat dengan yang seharusnya Belum maksimal, penyelenggaraan perda ini sudah tepat, hanya saja Belum maksimal, kurangnya tenaga kerja, peralatan serta harus dilakukan kontrol oleh dinas terkait mengenai penerapan perda ini, agar penjemputan sampah oleh mobil dari kabupaten selalu tepat waktu, jangan sampai terlambatnya penjemputan sampah oleh mobil dari kabupaten untuk mengangkut sampah, karena hal ini akan mengakibatkan sampah menumpuk. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi sudah tepat dengan yang



seharusnya masih kurang maksimal, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan tepat dengan yang seharusnya.

- Manfaat penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 87 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Manfaat penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 45-88.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Manfaat penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi sudah dapat dirasakan, hanya saja Belum maksimal, karena masih kurang fasilitas, banyak sampah berserakan disekitaran tong sampah yang penuh, serta penjemputan dari kabupaten yang sering terlambat, kurangnya tenaga kerja, serta harus dilakukan kontrol oleh dinas terkait mengenai penerapan perda ini, agar penjemputan sampah oleh mobil dari kabupaten selalu tepat waktu, jangan sampai terlambatnya penjemputan sampah oleh mobil dari kabupaten untuk mengangkut sampah, karena hal ini akan mengakibatkan sampah menumpuk. hal ini dibuktikan dengan hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Manfaat penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi masih kurang baik, serta dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Informan yang menjelaskan mengenai Manfaat penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi.

## **5. SIMPULAN**

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata total 84 berarti berada pada interval Kurang Baik, Serta wawancara penulis dengan informan dilapangan yang menunjukkan memang masih kurang baiknya pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ini, terlihat dengan seluruh indikator pada penelitian ini menunjukkan kurang baiknya Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Singingi, hasil wawancara ini di dukung dengan observasi dilapangan yang memperlihatkan masih banyak sampah berserakan dikarenakan terlambatnya pengangkutan sampah, dan fasilitas seperti tong sampah yang kurang sehingga mengakibatkan sampah di buang tidak pada tempat yang seharusnya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Alm Joni Gunawan dan Ibunda Delita Aminah yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku dosen pembimbing I, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried, 2015. *Teori dan Konsep Administrasi: dari Pemikiran Paradigmatik menuju Redefinisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Bridgman, Peter dan Glyn Davis (2004), *The Australian Policy Handbook*, Allen and Unwin, Crows Nest
- Dunn, William N. 2004, (1981) *Public Policy Analisis : An introduction, new jersey : person education*. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *pengantar kebijakan publik*, yogyakarta : gadjah mada university press.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Fayol, Henry. 2010. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill
- Gibson, Ivancevich, Donnely. 1993. *Organisasi, perilaku, Struktur dan proses*, Edisi. Kelima, Cetakan Ketujuh Terjemahan Djarkasih, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta
- Heinz, Eulau. and Kenneth Prewitt. 1973. *Labyrinths Of Democracy*. Indianapolis: Boobs Merrill
- Kranenburg, R dan Tk. B. Sabaroedin. 1986. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. PT. Gramedia : Jakarta
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan Handoko, T. Hani, 2002, *Organisasi Perusahaan*. Edisi Kedua, Yogyakarta : BPFE
- S. Alex, 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djembatan
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Simamora, Henry. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi ke-2, Cetakan Kedua, Bagian Penerbitan STIE YKPN : Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti, Sri. 2011. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat* Pendahuluan
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Suharto. Edi, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksar



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta  
Tohardi. Ahmad, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, Mandar

Sumber lain :

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan  
Persampahan/Kebersihan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Sistem open  
dumping